



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 126 /PMK.07/2010  
TENTANG PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN  
TRANSFER KE DAERAH

LAMPIRAN I

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH		JUMLAH	Diterima Tanggal
<b>I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPPN JAKARTA II</b>			
<b>DBH PAJAK Bagian Pusat</b>			
- PBB Tahap ...	: Rp	-	(2)
- BPHTB Tahap ...	: Rp	-	(2)
- PPh Pasal 21 Triwulan ...	: Rp	-	(2)
- PPh Pasal 25/29 Triwulan ...	: Rp	-	(2)
<b>SUBJUMLAH PENYALURAN DBH PAJAK Bag. Pusat</b>	<b>: Rp</b>	<b>-</b>	
<b>DBH CUKAI</b>			
- DBH Cukai Hasil Tembakau Triwulan ...	: Rp	-	(2)
<b>SUBJUMLAH PENYALURAN DBH CUKAI</b>	<b>: Rp</b>	<b>-</b>	
<b>DBH SDA</b>			
<b>PERTAMBANGAN UMUM</b>			
- Pertambangan Umum - Landrent Triwulan ...	: Rp	-	(2)
- Pertambangan Umum - Royalty Triwulan ...	: Rp	-	(2)
<b>MINYAK</b>			
- Minyak 15% Triwulan ...	: Rp	-	(2)
- Minyak 0,5% Triwulan ...	: Rp	-	(2)
- Minyak Dalam Rangka Otsus Triwulan ...	: Rp	-	(2)
<b>GAS</b>			
- Gas 30% Triwulan ...	: Rp	-	(2)
- Gas 0,5% Triwulan ...	: Rp	-	(2)
- Gas Dalam Rangka Otsus Triwulan ...	: Rp	-	(2)
<b>PANAS BUMI</b>			
- Panas Bumi ...	: Rp	-	(2)
<b>KEHUTANAN</b>			
- PSDH Triwulan ...	: Rp	-	(2)
- HUPH Triwulan ...	: Rp	-	(2)
- DR Triwulan ...	: Rp	-	(2)
<b>PERIKANAN</b>			
- Perikanan Triwulan ...	: Rp	-	(2)
<b>SUBJUMLAH PENYALURAN DBH SDA</b>	<b>: Rp</b>	<b>-</b>	
<b>DAU</b>			
- Dana Alokasi Umum	: Rp	-	(2)
<b>SUBJUMLAH PENYALURAN DAU</b>	<b>: Rp</b>	<b>-</b>	
<b>DAK</b>			
- Dana Alokasi Khusus Tahap ...	: Rp	-	(2)
<b>SUBJUMLAH PENYALURAN DAK</b>	<b>: Rp</b>	<b>-</b>	
<b>DANA OTONOMI KHUSUS</b>			
- Dana Otsus Provinsi ...	: Rp	-	(2)
<b>SUBJUMLAH PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS</b>	<b>: Rp</b>	<b>-</b>	
<b>DANA PENYESUAIAN</b>			
- Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	: Rp	-	(2)
- Dana Selisih Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)	: Rp	-	(2)
- Dana Selisih Perhitungan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan & Lainnya	: Rp	-	(2)
- Dana Insentif Daerah (DID)	: Rp	-	(2)
- Dana Selisih Perhitungan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP)	: Rp	-	(2)
<b>SUBJUMLAH PENYALURAN DANA PENYESUAIAN</b>	<b>: Rp</b>	<b>-</b>	
<b>JUMLAH YANG DITERIMA MELALUI KPPN JAKARTA II</b>	<b>: Rp</b>	<b>-</b>	
<b>II. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BO III</b>			
<b>DBH PAJAK Bagian Daerah + Biaya Pungut</b>			
PBB Bagian Daerah Bulan ... T.A. .... <sup>(1)</sup>	: Rp	- (7)	(2)
PBB Pertambangan Migas Triwulan ... <sup>(4)</sup>	: Rp	- (7)	(2)
Biaya Pungut PBB Bagian Daerah Bulan ... T.A. .... <sup>(5)</sup>	: Rp	- (7)	(2)
BPHTB Bagian Daerah Bulan ... T.A. .... <sup>(6)</sup>	: Rp	- (7)	(2)
<b>SUBJUMLAH PENYALURAN DBH PAJAK Bag. Daerah</b>	<b>: Rp</b>	<b>- (8)</b>	
<b>JUMLAH YANG DITERIMA MELALUI BO III</b>	<b>: Rp</b>	<b>- (9)</b>	
<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER</b>	<b>: Rp</b>	<b>- (10)</b>	
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :			
- Rekening Kas Daerah	---> Nomor Rekening	:	.....
	Nama Rekening	:	.....
	Nama Bank	:	.....
(11) 2009			
Bupati ..... / Pejabat yang ditunjuk dengan SK Bupati			
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">MATERAI Rp.6000,-</div> (12)			
(13)			

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Pj. Kepala Bagian TU Departemen  
Adelina Sirait  
NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 126 /PMK.07/2010  
TENTANG PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN  
TRANSFER KE DAERAH

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota \*) ..... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran ..... Tahap ..... sebagai berikut :

**Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara**

Tahap I : Rp  
Tahap II : Rp  
Total : Rp

**Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah**

Tahap Ini : Rp  
Kumulatif s.d Tahap Ini : Rp

Sisa Dana DAK di Rekening Kas Umum Daerah : Rp  
Persentase Sisa Dana DAK :

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
1.	Pendidikan	-	-	-	-	-
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	-	-
3.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	-	-
4.	Jalan	-	-	-	-	-
5.	Irigasi	-	-	-	-	-
6.	Air Minum	-	-	-	-	-
7.	Sanitasi	-	-	-	-	-
8.	Prasarana Pemerintahan	-	-	-	-	-
9.	Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-
10.	Pertanian	-	-	-	-	-
11.	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
12.	Keluarga Berencana	-	-	-	-	-
13.	Kehutanan	-	-	-	-	-
14.	Sarana dan Prasarana Perdesaan	-	-	-	-	-
15.	Perdagangan	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal  
Gubernur/Bupati/Walikota

NAMA

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U.

Adelina Sirait

NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota\*).....  
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*)..... telah/akan\*)  
menyediakan Dana Pendamping DAK sekurang-kurangnya 10% untuk masing-masing  
bidang dalam APBD/APBD-P \*) Tahun Anggaran 2011.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Gubernur/Bupati/Walikota \*).....

Nama

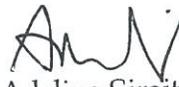
\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen

  
Adelina Sirait

NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 126 /PMK.07/2010  
TENTANG PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN  
TRANSFER KE DAERAH

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Tahap I	:	Rp
Tahap II	:	Rp
Tahap III	:	Rp
Total	:	Rp

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa DAK di Kas Daerah	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d 31 Desember .....
1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6
1.	Pendidikan	-	-	-	-
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	-
3.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	-
4.	Jalan	-	-	-	-
5.	Irigasi	-	-	-	-
6.	Air Minum	-	-	-	-
7.	Sanitasi	-	-	-	-
8.	Prasarana Pemerintahan	-	-	-	-
9.	Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
10.	Pertanian	-	-	-	-
11.	Lingkungan Hidup	-	-	-	-
12.	Keluarga Berencana	-	-	-	-
13.	Kehutanan	-	-	-	-
14.	Sarana dan Prasarana Perdesaan	-	-	-	-
15.	Perdagangan	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

Tempat, Tanggal  
Gubernur/Bupati/Walikota \*).....

Nama

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen  
Adelina Sirait  
NIP 196606031987032000



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 126 /PMK.07/2010  
TENTANG PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN  
TRANSFER KE DAERAH

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN ..... s.d. ....**

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota \*) ..... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2003 s.d. 2009 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Sisa DAK pada Akhir Tahun Anggaran		Penggunaan Sisa DAK Tahun Sebelumnya Pada Tahun berikutnya	
		Rupiah	Bidang	Rupiah	Bidang
1	2	3		4	5
1.	TA. 2003				
2.	TA. 2004				
3.	TA. 2005				
4.	TA. 2006				
5.	TA. 2007				
6.	TA. 2008				
7.	TA. 2009				
8.	TA. 2010 .....dst				
	<b>Jumlah</b>				

Bukti-bukti realisasi pembayaran atas penggunaan sisa DAK kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal  
Gubernur/Bupati/Walikota

Keterangan :

\*) Diisi sesuai bidang yang dibiayai dari sisa DAK untuk setiap tahun anggaran

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Pj. Kepala Bagian TU Departemen  
Adelina Sirait  
NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO